

ABSTRAK

Studi penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Hukum dalam akta perikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan pengakuan hutang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam pembuatan Perjanjian perikatan jual beli untuk kepentingan pengakuan hutang? Bagaimana keabsahan Perjanjian perikatan jual beli tersebut, serta tanggung jawab para pihak apabila ada salah satu pihak yang mengalami wanprestasi? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Notaris di kota Yogyakarta, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dan pendapat. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dipadukan dengan fakta-fakta yang diperoleh dengan cara wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap akta jual beli Notaris yang dibuat untuk kepentingan utang piutang masih banyak kelemahan, kelemahan tersebut mencakup aturan-aturan hukum formal yang secara penuh belum dapat dilindungi hak-hak nya antara para pihak, diantaranya seperti: belum adanya kekuatan hukum pada akta tersebut apabila terjadi wanprestasi antar para pihak, terdapat kemungkinan dilakukan pembatalan akta, karena seharusnya akta perikatan jual beli dengan akta utang piutang dipisah dan tidak dijadikan satu, sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam penelitian ini penulis merekomendasikan kepada para pihak agar selalu mengedepankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Peraturan Undang-undang, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan Hukum yang sama.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Perjanjian Perikatan, Jual-beli, Pengakuan Hutang, Utang-piutang.

ABSTRACT

The writing study of this thesis aims to find out the objective conditions of the law in the sale and purchase agreement made by a notary for the purpose of recognizing debt. Formulation of the proposed problem is: What is the legal protection of a Notary in the making of a purchase agreement agreement for the purpose of acknowledging debt? How is the legally binding agreement of the sale and purchase agreement, as well as the responsibilities of the parties if any of the parties have defaulted? This study includes typology of normative legal research. The research data was collected by interviewing a Notary in the city of Yogyakarta, then processed and the results are presented in the form of descriptions and opinions. The analysis was carried out with a legislative approach combined with the facts obtained by interviewing. The results of this study indicate that the legal protection of the Notary sale and purchase deed that is made for the benefit of accounts payable is still a lot of weaknesses, these weaknesses include formal legal rules that have not been fully protected by the rights of the parties, including: lack of power the law on the deed if there is a default between the parties, there is a possibility of a deed cancellation, because the deed of sale agreement with the debt deed is separated and not made into one, so that in this case it is not in accordance with the provisions of the Act. In this study the authors recommend that the parties always prioritize their respective rights and obligations in accordance with the Law, so that the deed has the same legal power.

Keywords: Legal Protection, Notary, Engagement Agreement, Sale and Purchase, Recognition of Debt, Debts.